

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TRANSPARANSI ANGGARAN DAN PENINGKATAN KINERJA
APARAT PEMERINTAH DI DESA PANDAU JAYA
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



UIN SUSKA RIAU

DI SUSUN OLEH :

MALIK AFIE
NIM: 11425103960

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul **TRANSPARANSI ANGGARAN DAN PENINGKATAN KINERJA APARAT PEMERINTAH DESA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Yang ditulis oleh:

Nama : MALIK AFIF
 NIM : 11425103960
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, ^{22/06} 2021
 Pembimbing Skripsi


Dr.H. SUHAYIB, M.Ag
 NIP 196312311992031037

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Transparansi Anggaran dan Kinerja Aparat Pemerintah di Desa Pandau Jaya Perspektif Ekonomi Islam** yang ditulis oleh :

Nama : MALIK AFIF
NIM : 11425103960
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqosyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/ 15 Juli 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua
Dr. H. Erman, M.Ag.

Sekretaris
Deni Rahmatillah, M.E,Sy

Penguji I
Afdhol Rinaldi, S.E, M.Ec

Penguji II
Jonnius, S.E,MM

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP : 19741006 200501 1 005



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Transparansi Anggaran Dan Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah Di Desa Pandau Jaya Perspektif Ekonomi Islam.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum transparannya anggaran desa sesuai peraturan dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin. kinerja aparatur desa yang kurang baik disebabkan oleh kurang disiplinnya aparat pemerintah desa sehingga aparat desa perlu untuk membuka kemudahan akses informasi bagi masyarakat dan peningkatan kinerja.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pandau Jaya kecamatan Siak Hulu. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana transparansi anggaran pemerintah desa Pandau Jaya kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (2) Bagaimana kinerja aparat pemerintah desa pandau jaya kecamatan siak hulu kabupaten kampar (3) Pandangan ekonomi islam terhadap transparansi anggaran dan kinerja aparat pemerintah desa pandau jaya kecamatan siak hulu kabupaten kampar Sedangkan tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana transparansi anggaran di desa pandau jaya (2) Untuk mengetahui bagaimana kinerja aparat pemerintah desa pandau jaya (3) untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap transparansi anggaran dan peningkatan kinerja aparat pemerintah desa.

informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala Desa Pandau Jaya dan jajarannya yang dipilih oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan informasi, dan beberapa warga setempat total informan berjumlah 7 orang, dengan metode *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dianalisis menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Hasil dalam penelitian ini yakni transparansi anggaran dan peningkatan kinerja di desa pandau jaya telah melakukan upaya yang baik dalam melaksanakan transparansi anggaran dan peningkatan kinerja dengan hal tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik, optimal dan maksimal serta meningkatkan kualitas pengurus. Bentuk transparansi seperti pemuatan informasi laporan keuangan dan pengelolaan aset yang mudah di akses oleh masyarakat dan kinerja serta sumber daya manusia yang kompeten dapat memberikan pelayanan yang semestinya kepada masyarakat.

Menurut Perspektif Ekonomi Islam yaitu dengan profesionalisme pengurus yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab, disiplin dalam menjalankan tugasnya, sehingga hal-hal tersebut selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“TRANSPARANSI ANGGARAN DAN PENINGKATAN KINERJA APARAT PEMERINTAH DI DESA PANDAU JAYA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan ananda, sekaligus dukungan moril maupun materil yang memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda Usman Sutrajaya Amd, dan Ibunda Muslinarti yang selalu hidup di hati sanubari ini serta kakak dan adikku yang juga memberi semangat Ibnu kaldum, Arifin Husni dan Bintang Nurfajri
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Syahpawi, S.Ag, M.Sh dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syari'ah, Bapak Ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik yang membantu penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang meberikan nasehat dalam masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Bapak Firdaus Roza selaku kepala desa pandau jaya, Bapak Munir selaku Kaur pemerintahan, dan Ibuk Nuraini selaku Bendahara Desa yang telah membantu penulis.
9. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
10. Teman-teman seperjuangan di Lokal Ekonomi Syari'ah C angkatan 2014 yang telah memberi semangat. Serta sahabat-sahabat tercinta Alan Nuari S.E, Armensyah Lubis SE, Rendra DeldiUsman SE, Wahyudi SE, , dan, Rio Rinaldi S.E, Rahman S S.E yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis, sebagai referensi bagi penulis. Dan terima kasih banyak atas semangat yang diberikan.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu' alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2021

Malik Afif
NIM. 11425103960

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Transparansi Anggaran Dan Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah Di Desa Pandau Jaya Perspektif Ekonomi Islam.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum transparannya anggaran desa sesuai peraturan dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin. kinerja aparatur desa yang kurang baik disebabkan oleh kurang disiplinnya aparat pemerintah desa sehingga aparat desa perlu untuk membuka kemudahan akses informasi bagi masyarakat dan peningkatan kinerja.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pandau Jaya kecamatan Siak Hulu. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana transparansi anggaran pemerintah desa Pandau Jaya kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (2) Bagaimana kinerja aparat pemerintah desa pandau jaya kecamatan siak hulu kabupaten kampar (3) Pandangan ekonomi islam terhadap transparansi anggaran dan kinerja aparat pemerintah desa pandau jaya kecamatan siak hulu kabupaten kampar Sedangkan tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana transparansi anggaran di desa pandau jaya (2) Untuk mengetahui bagaimana kinerja aparat pemerintah desa pandau jaya (3) untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap transparansi anggaran dan peningkatan kinerja aparat pemerintah desa.

informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala Desa Pandau Jaya dan jajarannya yang dipilih oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan informasi, dan beberapa warga setempat total informan berjumlah 7 orang, dengan metode *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dianalisis menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Hasil dalam penelitian ini yakni transparansi anggaran dan peningkatan kinerja di desa pandau jaya telah melakukan upaya yang baik dalam melaksanakan transparansi anggaran dan peningkatan kinerja dengan hal tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik, optimal dan maksimal serta meningkatkan kualitas pengurus. Bentuk transparansi seperti pemuatan informasi laporan keuangan dan pengelolaan aset yang mudah di akses oleh masyarakat dan kinerja serta sumber daya manusia yang kompeten dapat memberikan pelayanan yang semestinya kepada masyarakat.

Menurut Perspektif Ekonomi Islam yaitu dengan profesionalisme pengurus yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab, disiplin dalam menjalankan tugasnya, sehingga hal-hal tersebut selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“TRANSPARANSI ANGGARAN DAN PENINGKATAN KINERJA APARAT PEMERINTAH DI DESA PANDAU JAYA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan ananda, sekaligus dukungan moril maupun materil yang memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda Usman Sutrajaya Amd, dan Ibunda Muslinarti yang selalu hidup di hati sanubari ini serta kakak dan adikku yang juga memberi semangat Ibnu kaldum, Arifin Husni dan Bintang Nurfajri
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Syahpawi, S.Ag, M.Sh dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syari'ah, Bapak Ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik yang membantu penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang meberikan nasehat dalam masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Bapak Firdaus Roza selaku kepala desa pandau jaya, Bapak Munir selaku Kaur pemerintahan, dan Ibuk Nuraini selaku Bendahara Desa yang telah membantu penulis.
9. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
10. Teman-teman seperjuangan di Lokal Ekonomi Syari'ah C angkatan 2014 yang telah memberi semangat. Serta sahabat-sahabat tercinta Alan Nuari S.E, Armensyah Lubis SE, Rendra DeldiUsman SE, Wahyudi SE, , dan, Rio Rinaldi S.E, Rahman S S.E yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis, sebagai referensi bagi penulis. Dan terima kasih banyak atas semangat yang diberikan.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu' alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2021

Malik Afif
NIM. 11425103960

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	15
A. Daerah Penelitian	15
1. Jumlah Penduduk.....	16
2. Pendidikan	17
3. Agama.....	19
B. Struktur Organisasi Desa Pandau Jaya	20
BAB III TINJAUAN TEORITIS	24
A. Transparansi.....	24
1. Pengertian	24
2. Prinsip Transparansi	25
3. Dimensi Transparansi	27
4. Indikator Transparansi.....	28
5. Transparansi Anggaran.....	29
B. Pengertian Anggaran	29
1. Perencanaan	30
2. Penyusunan Rancangan Anggaran	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kinerja	33
1. Pengertian	33
2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja.....	35
3. Indikator Kinerja.....	36
D. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Transparansi Anggaran Dan Kinerja.....	37
1. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Transparansi Anggaran	37
2. Pandangan Islam Terhadap Kinerja.....	38
E. Konsep Operasional.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Transparansi Anggaran Pemerintah Desa Pandau Jaya.....	42
B. Kinerja Aparat Desa Pandau Jaya	46
C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Transparansi Anggaran dan Peningkatan Kinerja	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Absensi Pegawai Kantor Desa Pandau Jaya Periode Januari – Maret	8
Tabel 2	Distribusi Rensponden Penelitian.	11
Tabel 3	Keadaan Penduduk Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	16
Tabel 4	Jumlah Penduduk Menurut Suku Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu	17
Tabel 5	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Didesa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu	18
Tabel 6	Jumlah Sekolah Yang Ada Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	18
Tabel 7	Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu	19
Tabel 8	Jumlah Sarana Peribadatan Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu	19
Tabel 9	Daftar Nama Pegawai Di Desa Pandau Jaya.	22
Tabel 10	Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Pandau Jaya	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

TABEL 1..... 9

TABEL 2..... 12

TABEL 3..... 17

TABEL 4..... 18

TABEL 5..... 19

TABEL 6..... 20

TABEL 7..... 20

TABEL 8..... 21

TABEL 9..... 23

TABEL 10..... 24

TABEL 11..... 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dan memberikan keluasaan dan juga bagi daerah, makanya yang paling mendasar bagi otonomi daerah itu adalah, adanya kewenangan yang luas pada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, menurut prakarsa dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Pelaksanaan otonomi secara nyata akan menciptakan suatu kondisi dimana segala kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat daerah, hal ini memiliki makna mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,¹ masyarakat menaruh harapan besar terhadap implementasi otonomi daerah itu, kehadiran otonomi daerah merupakan nuansa baru, angin segar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan otonomi daerah, berarti daerah diberikan keluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan mengatur rumah tangganya sendiri. Begitu juga halnya pemerintahan yang diatur melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2004 lebih memberikan keluasaan dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan

¹Mardiasmo, *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2004) hlm. 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat desa, menumbuhkan prakarsan kreatifitas, meningkatkan peran serta mengembangkan peran dan fungsi lembaga demokrasi desa.

Pada perkembangannya sebagian besar desa² di Indonesia pada hakekatnya sampai sekarang masih tetap merupakan kesatuan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada peraturan hukum adat. Penyeragaman peraturan desa justru menghambat tumbuhnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan penghidupannya secara mandiri, sehingga hanya membuatnya tertinggal dibanding masyarakat lain. Di pihak lain, antisipasi terhadap berbagai perkembangan masyarakat akibat berbagai tuntutan termasuk perkembangan penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Organisasi sektor publik pemerintah daerah dituntut mampu memenuhi kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk selalu mengerti akan tuntutan lingkungannya. Pemerintah desa juga senantiasa dituntut memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta melakukan pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Dengan adanya anggaran yang jelas maka pembagian tugas akan efektif dan efisien terhadap pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2011) hlm. 5



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penyusunan dan perencanaan anggaran publik merupakan suatu proses yang cukup rumit. hal ini berbeda dengan penggaran pada sektor privat. Anggaran pada sektor privat merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik. Sebaliknya pada sektor publik, anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan untuk menambah masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.³

Perubahan-perubahan atas rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya lazim dilakukan. Praktik yang berlaku adalah anggaran murni dan anggaran perubahan. Anggaran murni adalah anggaran awal seperti terdapat dalam RAPBD. Anggaran perubahan adalah anggaran yang ditetapkan setelah RAPBD berjalan. Selisih besaran antara realisasi dengan anggaran yang ditetapkan ini menjadi perhatian utama. Besaran angka tersebut secara tidak langsung mengungkapkan kapasitas pegawai dalam penyusunan anggaran.

Secara teknis, perkiraan keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan dan perencanaan anggaran. Keadaan internal yang berada dibawah kendali semestinya bisa diakomodasikan dengan baik. Persoalan yang muncul adalah perubahan-perubahan eksternal yang berada diluar kendali sehingga sulit diperkirakan. Kemampuan melihat jauh kedepan semacam ini yang akan menentukan ketepatan anggaran dengan realisasinya. Selisih antara anggaran dengan

³Mardiasmo, *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2004) hlm. 55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

realisasinya menjadi indikator “Keberhasilan” penyusunan dan perencanaan anggaran. Sebagai konsekuensinya, penyusun cenderung bersifat mencari aman dengan menetapkan anggaran pada angka yang relatif rendah dengan harapan agar dapat dengan mudah dicapai realisasinya.

Kesalahan memprediksi akan mengacaukan rencana yang telah disusun dan berdampak pada penilaian kinerjanya. Anggaran pada sektor publik meliputi aspek perencanaan, aspek pengawasan. Anggaran sebagai perencanaan yang dimaksud adalah anggaran merupakan rencana kegiatan yang terjadi dari sejumlah target yang akan dicapai oleh para pimpinan dari suatu instansi dalam melaksanakan kegiatan tertentu pada masa yang akan datang.

Pengelolaan anggaran pemerintah daerah merupakan wujud dari pemerintah yang berakuntabilitas. Untuk mencapai akuntabilitas publik dapat dilakukan dengan cara penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata. Pemanfaatkan sumber keuangan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah yang merupakan hak dan kewenangan dari pemerintah daerah.

Anggaran⁴ adalah alat perencanaan yang berupa elemen sistem pengendalian manajemen yang digunakan manajer untuk melaksanakan kegiatan operasional organisasinya secara efektif dan efisien. Lingkup anggaran mempunyai fungsi yang sangat penting di pemerintah daerah terkait dengan fungsi dari anggaran tersebut dengan akuntabilitas pemerintah.

⁴ Catur Sasonko, *ANGGARAN*, (Jakarta: CV Salemba Empat, 2010) hlm. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan penyusunan dan perencanaan anggaran tentu sangat diperlukan kinerja yang baik dari setiap individu yang akan menjalankannya. Kinerja (*performance*)⁵ adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika.

Menurut Doller&wallis, perencanaan dana desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Efektifitas dan efisiensi alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam perencanaan anggaran.⁶

Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, wasistiono dan tahir menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pada pemerintah desa pada umumnya yaitu: 1. Kualitas sumber daya aparatur yang

⁵ Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996) hlm. 150

⁶ Chambers Robert, *pembanguna desa*, (Jakarta : LP3ES, 2003), hlm. 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dimiliki desa pada umumnya masih rendah, 2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, 3. Rendahnya kemampuan perencanaan tingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan. 4. Saranadan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.⁷

Mencapai tujuan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan pengukuran kinerja untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim perlu melakukan pengevaluasian diri setiap diri diharapkan memiliki kemauan dan kemampuan secara objektif untuk membaca kitab hasil kerja sendiri. Ini yang dikenal dengan *Muhasabah*.

Berdasarkan dengan transparansi dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, salah satu prinsipnya adalah transparansi, transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Mutlak dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi dikalangan pelaksana pemerintah, baik pusat maupun yang dibawahnya. Penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah ketika ada sejumlah unsur yang terpenuhi, seperti keterbukaan, keterlibatan serta kemudahan akses masyarakat. Demikian hal nya dengan pemerintah desa sebagai salah satu badan publik juga patut menjaga

⁷ Ahmad, *kebijakan tentang dana desa dan ADD tahun 2016* dikutip dari [http:// desa.membangun.blogspot.co.id/2016/04/kebijakan-tentang-dana-desa-dan-ADD-tahun-2016.html](http://desa.membangun.blogspot.co.id/2016/04/kebijakan-tentang-dana-desa-dan-ADD-tahun-2016.html)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keterbukaan informasi. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan agar pembangunan desa dapat berlangsung secara kondusif. Dana desa pada intinya digunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya. Transparansi mutlak dilakukan pemerintah desa agar kepercayaan publik dan warga akan penggunaan dana menguat.

Dana desa merupakan berkah yang berpotensi menjadi bencana. Pasalnya jika tidak dikelola dengan baik, dana yang berjumlah milyaran tersebut akan berubah menjadi bencana. Semakin kuatnya posisi desa dalam proses pembangunan menunjukkan tuntutan publik yaitu tata kelola pemerintah desa berlangsung secara akuntabel. Dari pra penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui berapa anggaran dana desa yang direalisasikan oleh pemerintah desa mereka pertahunnya. Dan ada laporan dari masyarakat bahwa pengelolaan keuangan desa tidak transparan, hal ini mereka katakan bahwa jumlah dana desa yang turun dari pemerintah dan dialokasikan untuk apa saja mereka tidak mengetahuinya, dan yang tahu terkait desa hanya segelintir orang saja. Sedangkan dilihat dari peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas Transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Laporan masyarakat sekitar tentang Masih kurang maksimalnya pelayanan dikantor desa⁸. Hal ini dapat dilihat dari waktu yang diperlakukan dalam menyelesaikan surat menyurat lain sebagainya. Dan masih kurang disiplinnya aparat pemerintah desa, terbukti dari data absensi aparat desa pandau jaya.

Tabel 1 Data absensi pegawai kantor desa pandau jaya periode Januari – Maret .

No.	Bulan	Jumlah Ketidakhadiran Pegawai		
		A	S	I
1	Januari	13	5	-
2	Februari	15	1	12
3	Maret	20	7	18

Sumber: data skunder dari staf Kantor Desa Pandau Jaya

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyak pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan. Pada bulan Januari terjadi 13 kali absen. Dan meningkat Pada buka Februari menjadi 15 kali. Dan di bulan Januari naik signifikan menjadi 20 kali. Hal ini menunjukkan masih kurang disiplinnya Aparat Pemerintah di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti **“Transparansi Anggaran Dan Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah Di Desa Pandau Jaya Perspektif Ekonomi Islam”**

⁸ Effendi, warga desa pandau jaya, wawancara, pandau, 15 juli 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan topik permasalahan, maka penulis membatasi permasalahannya yaitu: di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana transparansi anggaran pemerintah desa Pandau Jaya kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimana kinerja aparat Pemerintah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?
3. Pandangan Ekonomi Islam terhadap transparansi anggaran dan kinerja aparat pemerintah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Transparansi Anggaran di Pemerintah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Kinerja Aparat Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam terhadap Transparansi Anggaran dan Kinerja Aparat Pemerintahan Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

2. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan peneliti mengenai Transparansi anggaran dan peningkatan kinerja aparat Pemerintahan Desa Pandau Jaya
- b. Mengetahui informasi yang lebih mendalam tentang Transparansi anggaran terhadap dan kinerja aparat pemerintah.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program (S1) pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Ekonomi Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Pandau Jaya yang berlokasi di jalan pandau permai, kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar

2. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai desa atau aparat desa dan warga setempat di desa Pandau Jaya yang diwakili oleh BPD Sedangkan sebagai objek penelitian ini adalah Transparansi Perencanaan anggaran dan kinerja aparat pemerintahan desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Informan penelitian

Informan penelitian terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh narasumber atau responden untuk mendapatkan data terkait permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapaun informan penelitian yaitu:

Tabel 2. Distribusi Responden Penelitian.

No.	Informan	Jabatan
1	Firdaus Roza	Kepala Desa
2	M Yani Yahya	Sekretaris Desa
3	Ir. Nuraini	Bendahara Desa
4	Munir S. Kom	Kaur Pemerintah
5	Zulhendra	Staf Desa
6	Effendi	MASYARAKAT
7	Indraja Muda	MASYARAKAT

4. Sumber data⁹

- Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan dari tempat penulis melakukan penelitian, data ini bertujuan untuk mengetahui kejelasan sasaran anggaran di Kantor desa Pandau Jaya.
- Data sekunder, yaitu semua data penunjang atau data pendukung yang berhubungan langsung dengan masalah yang teliti.

5. Metode pengumpulan data

Adapun metode yang akan digunakan dari pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- Observasi

⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 149



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka yaitu dengan mewawancarai.
- c. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan berbentuk dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.¹⁰

7. Metode penelitian

Setelah data dianalisa, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu dengan menggunakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu menggunakan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan analisis.

¹⁰Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Bandung: UIN-MALIKI Press, 2010), Cet. 2, H. 352



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai : latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang: sejarah kantor desa Pandau Jaya, serta Struktur Organisasi.

BAB III : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini merupakan bagian teoritis dengan mengemukakan bagian transparansi anggaran dan kinerja yang meliputi: pengertian transparansi, perencanaan anggaran, indikator transparansi, kinerja, landasan hukum transparansi perencanaan anggaran terhadap kinerja aparatur desa, prinsip perencanaan anggaran, fungsi dan tujuan transparansi perencanaan anggaran, proses pelaksanaan anggaran kepada aparatur desa.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan bagian inti dari permasalahan yang diangkat yaitu dengan memaparkan dan menggambarkan transparansi perencanaan anggaran dan kinerja aparatur desa Pandau Jaya, bagian ini meliputi: bagaimana transparansi anggaran di Desa Pandau Jaya sehingga warga mendapatkan informasi dan bagaimana kinerja aparat pemerintah di Desa Pandau Jaya dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap transparansi anggaran dan kinerja aparat pemerintah didesa pandau jaya.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari inti permasalahan dengan disertai saran-saran yang menunjang oraganisasi untuk menjadi lebih baik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Daerah Penelitian

Desa Pandau Jaya merupakan salah satu desa yang terdapat dikabupaten Kampar, merupakan bagian dari pemerintahan kecamatan siak hulu, kecamatan siak hulu terdiri dari dua belas desa, yakni: Desa Pantai Raja, Buluh Cina, Bulu Nipis, Pangkalan Baru, Desa Baru, Lubuk Siam, Kampung Pinang, Teratak Buluh, Hangtuah, Sialang Kumbang, Tanah Merah dan Pandau Jaya.

Desa Pandau Jaya dibentuk berdasarkan surat keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Riau Nomor : 41 tahun 1999 tentan pengesahan desa tanah merah dan desa pandau jaya, desa pandau jaya memiliki luas wilayah pemerintah seluas 15 Km yang terdiri dari empat dusun antara lain:

Dusun I : Pandau Makmur

Dusun II : Pandau Jaya

Dusun III : Bencah Limbat

Dusun IV : Gading Marpoyan

Jarak antara Desa Pandau Jaya dengan pemerintahan ibukota kecama lebih kurang 30km, sedangkan dengan pemerintahan ibukota kabupaten lebih kurang 72km, kemudian jarak dari ibukota propinsi lebih kuran 16km. Adapun batas wilayan desa pandau jaya sebagai berikut:

- Sebelah utara jalan pasir putih
- Sebelah selatan sungai tangon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sebelah barat desa baru
- Sebelah timur sungai sialang

1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Pandau Jaya hingga Desember 2020 berjumlah 22.890 yang terdiri dari 11.896 pria dan 10994 wanita. Untuk lebih jelasnya keadan penduduk dilihat dari jenis kelamin dan kelompok umur dapat diliat table berikut:

Tabel 3. Keadaan Penduduk Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar¹¹

No	USIA	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	0 – 12 bulan	597 orang	649 orang
2	1 – 5 tahun	702 orang	730 orang
3	6 – 10 tahun	1053 orang	933 orang
4	11 – 15 tahun	1033 orang	1118 orang
5	16 – 20 tahun	936 orang	903 orang
6	21 – 25 tahun	874 orang	910 orang
7	26 – 30 tahun	998 orang	876 orang
8	31 – 35 tahun	670 orang	715 orang
9	36 – 40 tahun	822 orang	826 orang
10	38 tahun	753 orang	678 orang
11	41 – 45 tahun	1102 orang	980 orang
12	46 – 50 tahun	670 orang	515 orang
13	51 – 55 tahun	781 orang	450 orang
14	56 – 60 tahun	680 orang	483 orang
15	61 – 65 tahun	32 orang	55 orang
16	66 – 70 tahun	78 orang	74 orang
17	71 – 75 tahun	35 orang	43 orang
18	76 – 75 tahun	26 orang	20 orang
19	76 – 80 tahun	18 orang	23 orang
	>80	11.896 orang	10.994 orang

Sumber desa pandau jaya, 2020

¹¹ Dokumen desan pandau jaya, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dilihat penduduk desa pandau jaya berdasarkan jenis kelamin, dimana penduduk kelamin pria lebih banyak daripada penduduk jenis kelamin wanita.

Jumlah penduduk sebagaimana yang diuraikan diatas, dihuni oleh bermacam-macam suku bangsa. Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan suku bangsa dapat dilihat dari tabel 2 berikut ini:

Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Suku Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu¹²

No	Nama suku	Jumlah	%
1	Minang	9445	41
2	Jawa	7499	33
3	Melayu	2582	11
4	Batak	2030	9
5	Cina	532	2
6	Lain-lain	800	4
	Jumlah	22890	100

Sumber desa pandau jaya, 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah penduduk yang terbanyak adalah suku minang dengan jumlah 9445 jiwa atau 41% dari jumlah penduduk yang ada. Dan jumlah penduduk cina berjumlah 532 jiwa atau 2% kemudian 800 jiwa atau 4% adalah suku campuran seperti bugis, banjar, aceh dsb.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting yang harus didapati oleh setiap orang. Yang tentunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam rangka melaksanakan wajib belajar. Pendidikan yang dimiliki desan pandau jaya bervariasi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

¹² Dokumen desan pandau jaya, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Didesa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu.¹³

No	Tingkat pendidikan	jumlah	%
1	Belum Sekolah	2282	10
2	SD	6236	27
3	SMP	5828	25
4	SMA/SMK	5323	23
5	DIPLOMA	1133	5
6	SARJANA	2088	10
	jumlah	22890	100

Sumber kantor desa pandau jaya, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat desa pandau jaya relatif cukup baik. Hal ini dilihat dari jumlah masyarakat yang menyelesaikan pendidikan wajib belajar sembilan tahun 5828 jiwa atau 25% bahkan ada yan sudah perguruan tinggi sebanyak 10%

Sarana pendidikan pada desa pandau jaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6 Jumlah Sekolah Yang Ada Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar¹⁴

No	Tingkat sekolah	Jumlah
1	TK	6
2	SD	5
3	SMP	1
4	SMA	1
	jumlah	13

Sumber desa pandau jaya, 2020

Dari saran sekolah yang ada didesa pandau jaya dilihat tidak sesuai dengan pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Tapi banyak masyarakat yang sekolah kekota pekanbaru, karena jarak yang ditempuh

¹³ Dokumen desan pandau jaya, 2020

¹⁴ Dokumen desan pandau jaya, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terlalu jauh dari kota pekanbaru.

3. Agama

Agama yang dianut penduduk didesa pandau jaya sebagian beragaa islam namun agama-agama lain juga bergabung, sebagaimana yang terdapat pada daerah lain. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu¹⁵

No	agama	jumlah	%
1	Islam	19603	85.64
2	Kristen	2477	10.82
3	Khatolik	622	2.7
4	Budha	131	0.57
5	hindu	17	0.007
		22890	100

Sumber desa pandau jaya, 2020

Dari tabel diatas dilihat agama islam adalah agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat desa pandau jaya dengan jumlah 19603 jiwa atau 72% sedangkan agama hindu yang paling sedikit dengan jumlah 17 jiwa tahu 1%

Sarana ibadah yang ada didea pandau jaya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 8 Jumlah Sarana Peribadatan Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu¹⁶

No.	Sarana peribadatan	jumlah	%
1	Masjid	15	40.55
2	Musholla	13	35.13
3	Gereja	9	24.32
	jumlah	37	100

Sumber desa pandau jaya, 2020

¹⁵ Dokumen desan pandau jaya, 2020

¹⁶ Dokumen desan pandau jaya, 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

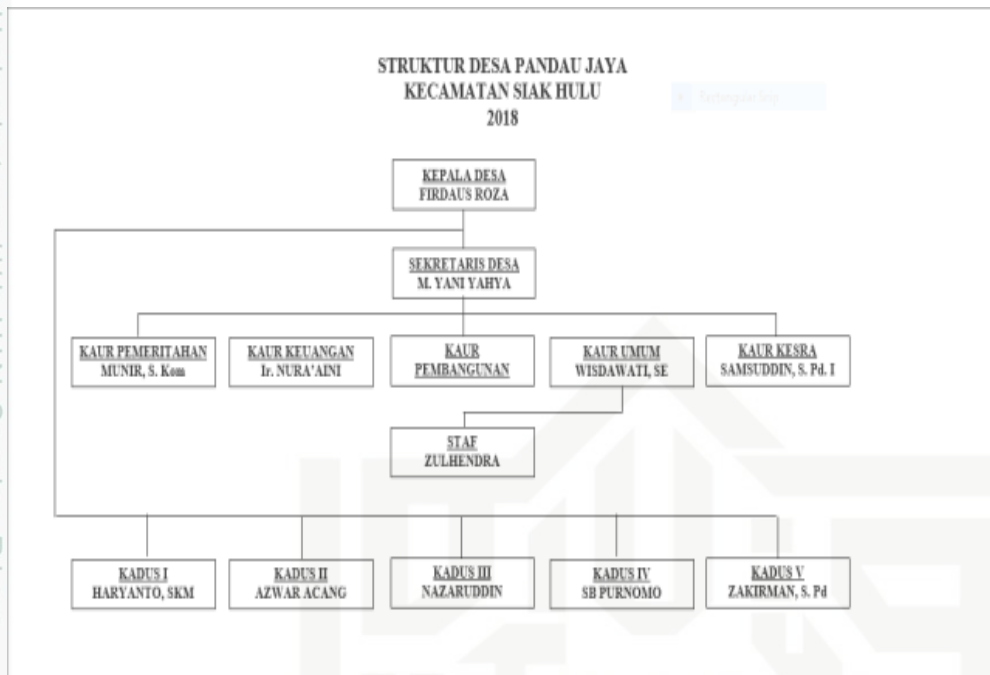
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pandau Jaya

Sebagaimana yang telah dimaklumi bersama, bahwa desa merupakan organisasi pangkat daerah yang terendah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa. Desa dipimpin oleh kepala desa yang langsung bertanggung jawab kepada bupati karena sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 205, ayat 1 bahwasanya proses kepala desa terpilih dan dilantik langsung oleh bupati, sehingga dapat mengemban serangkaian tugas dan fungsi yang harus dijalankan didalam melayani kepentingan masyarakat banyak.

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah desa yang telah ditetapkan, desa memiliki strukturasi keorganisasian guna menentukan garis kewenangan dan pembagian secara jelas dan tegas, sehingga terjalin hubungan kerjasama yang mengantarkan pada pencapaian tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan terutama berkaitan dengan kebutuhan seperti kepengurusan administrasi.

Struktur keorganisasian desa pandau jaya yang mengatur lebih lanjut uraian setiap tugas dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar No. 6 tahun 2007 tentang susunan organisasi pemerintahan desa dalam wilayah kampar. Adapun bentuk struktur organisasi pemerintah desa ini adalah organisasi garis, yakni ditandai dengan tanggung jawab dan wewenang berada dalam satu garis langsung dari pucuk pimpinan kepada masing masing bagian.



17

Dari bagan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan menjalankan tugas pemerintahannya dari pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten kampar.

b. BPD

Badan permusyawaratan desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa.

¹⁷ Dokumen desan pandau jaya, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kepala Dusun

Kepala dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah dibawah pemerintah desa. Satu desa terbagi beberapa dusun dan satu dusun terdiri dari beberapa Rw dan Rt.

Tabel.9 Daftar Nama Pegawai Di Desa Pandau Jaya.

Jabatan	Nama
Kepala Desa	Firdaus Roza
Sekertaris Desa	M. Yani Yahya
KAUR Pemerintahan	Munir S.Kom
KAUR Keuangan	Ir. Nuraini
KAUR Pembangunan	Bayu
KAUR Umum	Wisdawati S.E
KAUR Kesra	Samsudin S.Pd
Staf	Zulhendra
Kadus I	Haryanto SKM
Kadus II	Azwar Acang
Kadus III	Nazarudin
Kadus IV	SB purnomo
Kadus V	Zakirman S.pd

Sumber: desa pandau jaya

Selain pejabat pemerintah langsung, berikut pula nama-nama pejabat yang berpengaruh terhadap peraturan yang ada di Desa Pandau Jaya.

Tabel .10 Daftar nama Badan Permusyawaratan Desa Pandau Jaya

Nama	Jabatan
Yendri Nazir S. Sos M.Si	Ketua
Doddy syaputra	Anggota
Agus Wiyono	Anggota
Desmiarni	Anggota
Hamdani	Anggota

Sumber : desa pandau jaya



Dari tabel diatas menunjukkan bahwa struktur pemerintah desa pandau jaya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor. 72 tahun 2005 tetang desa pasal 12 ayat 1,2,3 yang menjelaskan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, dan perangkat desa yang terdiri dari sekertaris desa dan perangkat desa lainnya. Pelaksanaan teknis lapangan, unsur kewilayahan, data tabel tersebut juga menunjukkan bahwa unsur pemerintahan desa pandau jaya terdiri dari satu orang kepala desa dan tujuh orang perangkat desa dan anggota BPD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Transparansi

1. Pengertian

¹⁸Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat, menurut Hari Sarbano¹⁹ Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintah memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan pemerintah yang baik. Penjabaran secara lebih merinci mengenai transparansi sangat diperlukan,

¹⁸ Mardiasmo, *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2004) hlm. 60

¹⁹ Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, (Yogyakarta: C.V UGM Press, 2006) hlm. 87



karena pelaksanaan transparansi akan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Transparansi harus dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan publik, meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dan laporan hasil kerjanya.

Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggara pemerintah. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah sangat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi rakyat, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Tahap perencanaan dan penganggaran pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang dipresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

2. Prinsip Transparansi

Ada 6 prinsip transparansi yang dikekemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI), yaitu:²⁰

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)

²⁰ Mardiasmo, *otonomi dan manajemen keuangan daerah*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2004) hlm. 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- d. Laporan tahunan
- e. Website atau media publikasi
- f. Pedoman dalam penyebaran informasi

Prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi: ²¹

- 1) Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapat
- 2) Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat
- 3) Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan anggaran)
- 4) Keterbukaan register yang berisi fakta umum (catatan sipil, buku tanah dll)
- 5) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan

²¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang dilakukan oleh pemerintah desa Pandau Jaya kepada masyarakat.

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa karna penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini akses nya hanya dimiliki oleh pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan.

3. Dimensi transparansi

Transparansi memiliki beberapa dimensi²²

a. *Invormatifenese* (informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholder yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

b. *Openes* (keterbukaan)

Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

²² <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/12/transparansi/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Disclouser* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

4. Indikator transparansi

Ada lima indikator transparansi diantarlain:²³

- a. Terdapat pengumuman kebijakan terhadap pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
- b. Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset yang mudah diakses
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- d. Tersedia sarana untuk usulan suara rakyat
- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Dengan adanya indikator diatas indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan desa mereka sendiri.

²³ Arifin tahir, *kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*, (bandung:C.V alfabeta, 2012) hlm. 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Transparansi anggaran

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi pemerintah²⁴ dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam organisasi sektor publik melalui pertemuan terbuka, pemberian akses terhadap dokumen, publikasi informasi melalui website secara aktif, perlindungan terhadap website blower dan bahkan terhadap pembocoran informasi secara ilegal. Pada prinsipnya transparansi adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa sekaligus melibatkan masyarakat dalam menjalankan fungsi controlling terhadap segala upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan transparansi anggaran dapat diartikan sebagai keterbukaan menyeluruh atau semua informasi terkait anggaran.

B. Pengertian Anggaran

Anggaran²⁵ adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Anggaran membantu manajemen dalam melakukan koordinasi dan penerapannya dalam upaya memperoleh tujuan yang tertuang didalam anggaran. Anggaran memberikan gambaran kepada manajemen tentang sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang telah

²⁴ *Ibid*

²⁵ Catur Sasongko, *ANGGARAN*, (Jakarta: C.V Salemba Empat, 2010) hlm. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan oleh anggaran, kemudian anggaran juga menjelaskan koordinasi antarbagian dalam perusahaan sehingga tujuan bersama perusahaan dapat tercapai.

Data dan informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam penyusunan anggarannya dapat diperoleh dalam kegiatan dan kejadian yang terjadi diperusahaan dimasa lalu, masa sekarang, dan harapan-harapan yang ingin dicapai di masa mendatang. Dari sumber perolehan informasi untuk menyusun anggaran, perusahaan dapat memperoleh data dan informasi dari sumber-sumber internal perusahaan misalnya, laporan keuangan perusahaan dan laporan tahunan atau dari sumber eksternal perusahaan seperti, laporan penjualan industri, pertumbuhan ekonomi negara, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga.

1. Perencanaan

Perencanaan²⁶ dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam fungsi manajemen, tindakan dan perencanaan sangat memegang peranan penting karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam suatu organisasi.

Untuk menyusun rencana yang baik, dibutuhkan adanya data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dan dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dalam organisasi.

²⁶ Anggi rahajeng, *perencanaan penganggaran keuangan daerah*, (yogyakarta: UGM press, 2016) hlm. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga administrasi negara merumuskan pengertian perencanaan sebagai berikut:²⁷

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- b. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan dan penentuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan.
- c. Perencanaan adalah usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu.

Pengertian perencanaan tadi memperlihatkan bahwa terdapat unsur-unsur penting dalam suatu perencanaan. lembaga administrasi negara republik indonesia merumuskan unsur-unsur perencanaan sebagai berikut:

- a. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan kongkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan.
- b. Pilihan diantara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Agar perencanaan dapat menghasilkan suatu produk rencana yang baik, maka langkah-langkah penting yang harus diperhatikan adalah:²⁸

- a. Tujuan harus dibuat secara lengkap dan jelas, tujuan yang kabur akan sulit dimengerti dan karenanya akan sulit pula direncanakan.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid hlm. 26*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Rumusan kebijakan atau pedoman yang mengarahkan dan sekaligus membatasi tindakan yang akan dilakukan.
- c. Analisis dan penetapan cara dan sasaran untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijakan yang telah dirumuskan.

2. Penyusunan Rancangan Anggaran

APBDes merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan diturunkan dari pembangunan jangka menengah desa (lima tahun)²⁹. Yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih.

Setelah kepala desa dilantik, paling lambat tiga bulan ia harus menyusun RPJMDesa dengan visi dan misi sebagaimana disampaikan. Setelah RPJMDesa ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa.

RKPDes merupakan rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desanya. Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa. Sekertaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh

²⁹ Heriawan bihamding, *pengelolaan keuangan desa*, (jakarta: C.V budi utama, 2019) hlm. 61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.³⁰

Penyusunan dan penetapan anggaran, tidak terlepas dari pelaksanaan salah satu fungsi organik manajemen yaitu perencanaan, sebagai salah satu fungsi organik manajemen, maka selayaknya apabila setiap pemerintah daerah yang menginginkan tercapainya tujuan secara berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan perencanaan ini dengan sebaik-baiknya.

Sesuai siklus anggaran, maka proses penyusunan anggaran merupakan satu kegiatan yang utuh dan terpadu yang dilakukan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun anggaran.³¹

Secara garis besar proses penyusunan anggaran dimaksud adalah:

- a. Penentuan target dan plafond APBD/APBDes
- b. Penentuan proyek-proyek pembangunan
- c. Penentuan belanja rutin.

C. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Kinerja menurut kamus besar bahasa indonesia adalah melakukan sesuatu, sesuatu yang dilakukan. Sedangkan konsep kinerja merupakan singkatan dari *kinetika energi kerja* yang sinonimnya dalam bahasa inggris

³⁰ *Ibid hlm. 62*

³¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah *performance*. Istilah *performance* sering diindonesiakan sebagai performa. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh indikator-indikator suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu.³²

Menurut Sudarmanto, dalam berbagai literatur, pengertian tentang kinerja sangat beragam, akan tetapi, dari berbagai perbedaan pengertian, dapat dikategorikan dalam dua garis pengertian dibawah ini:

- a. Kinerja merujuk pengertian sebagai hasil, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktifitas selama periode waktu tertentu.
- b. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi tempat orang bekerja.³³

Terkait dengan konsep kinerja, ada 3 level kinerja yakni:

- 1) Kinerja organisasi; merupakan pencapaian hasil (*out come*) analisis organisasi. Kinerja pada level ini terkait dengan tujuan, rancangan dan manajemen organisasi.
- 2) Kinerja proses; merupakan kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk dan layanan.
- 3) Kinerja individu; merupakan pencapaian atau efektifitas tingkat pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan rancangan dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu.³⁴

³² Hussein fattah, *kepuasan kerja dan kinerja pegawai* , (yogyakarta: elmaterra, 2017) hlm. 15

³³ Wibowo, *manajemen kinerja* , (jakarta: rajawali press, 2016) hlm. 125



Dalam penelitian ini yang dikaji lebih spesifik adalah kinerja individu. Kinerja individu adalah pencapaian atau efektifitas tingkat pekerjaan.

2. Faktor yang mempengaruhi kinerja

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:³⁵

- a. Kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan seperti talenta, keterampilan, kecerdasan, pengetahuan, minat, dan karakteristik kepribadian.
- b. Usaha yang dilakukan seperti motivasi, etika kerja, kehadiran, pergantian pegawai, dan desain pekerjaan.
- c. Dukungan organisasi seperti pelatihan dan pengembangan, peralatan dan teknologi, standar kinerja, manajemen dan rekan kerja.

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja diatas dapat diketahui bahwa kemampuan dan usaha individu dalam bekerja akan saling mempengaruhi. Pegawai yang memiliki kemampuan yang baik jika tidak memiliki usaha yang sama baiknya dalam bekerja maka kemampuan yang dimiliki oleh pegawai tersebut tidak akan berguna. Selain itu,

³⁴ *Ibid*

³⁵ Selvia renyut, *peningkatan kinerja sumber daya manusia*, (jakarta: kretakupa press, 2010) hlm. 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adanya kemampuan dan usaha yang baik juga diperlukan adanya dukungan dari organisasi tempat seseorang bekerja. Jika ketiga faktor tersebut saling mendukung maka kinerja yang dihasilkan pegawai akan baik.

3. Indikator kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Indikator digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi atau unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemampuan dalam rangka dan atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.³⁶

Indikator kinerja sangat penting untuk melihat kinerja yang dilakukan oleh seorang pegawai. Indikator kinerja dapat berupa penilaian kinerja secara kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja seorang pegawai, dimana hal tersebut diperlukan untuk melihat apakah kinerja seorang pegawai meningkat dari sebelumnya.

Terdapat tiga indikator kinerja meliputi:³⁷

³⁶ Lijan poltak sinambella, *kinerja pegawai : teori pengukuran dan implikasi*, (sleman: graha ilmu, 2012) hlm. 105

³⁷ Moehariono, *indikator kinerja utama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan ini berkaitan dengan jumlah yang dihasilkan.
- b. Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran “ tingkat kepuasan” yaitu seberapa baik penyelesaiannya.
- c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari “pengukuran kuantitatif” yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

Indikator tersebut merupakan indikator dasar yang pada umumnya selalu ada untuk menilai kinerja pegawai. Dengan kata lain indikator tersebut lebih bersifat umum.

D. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Transparansi Anggaran Dan Kinerja

1. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Transparansi Anggaran

- a. Shidiq, benar, nilai dasarnya adalah interitas. Nilai-nilai dalam bisnisnya berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan emosional.
- b. Amanah, nilai dasarnya kepercayaan dan nilai-nilai dasarnya adalah kepercayaan, tanggungjawab, transparansi, dan tepat waktu.
- c. Fathanah, nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan luas, nilai-nilai dasar bisnisnya adalah memiliki visi dan pemimpin yang cerdas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tabligh, nilai dasarnya adalah komunikatif dan nilai dasar bisnisnya adalah supel, perjual yang cerdas, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim dan koordinasi.

Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi dalam sebuah organisasi, sehubungan dengan kejujuran, dalam al quran surah Al-is'ra 35 yaitu:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٥

Artinya : *“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.”*

Menekankan sikap transparan sangat penting untuk memperhatikan karena dalam surah AL-Muthafifin Allah telah mengatakan:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝٢

Artinya: *“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, yang dimaksud dengan orang-orang yang curang disini ialah orang-orang yang curang dalam menakar timbangan”*

2. Pandangan Islam Terhadap Kinerja

Kinerja dalam perspektif islam merupakan salah satu sarana hidup dan aktifitas yang mempunyai peran yang penting dalam kehidupan sosial. Bekerja sebagaimana dianjurkan agama bahkan bekerja bisa dijadikan tolak ukur untuk menilai seseorang. Menurut ajaran islam semua orang dituntut untuk mandiri oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan diri dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga ia wajib bekerja dan tidak boleh meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan primernya.³⁸

Setiap orang mempunyai kewajiban bekerja sesuai dengan kemampuan yang ada padanya dan sebagai pekerja karena setiap orang harus memenuhi kebutuhannya. Dilihat dari segi ekonomi, bekerja adalah salah satu sarana produksi yang sangat penting disamping modal dan faktor-faktor alam lainnya.

Dalam konsep islam bekerja adalah kewajiban bagi setiap manusia, walaupun allah telah menjamin rezeki setiap manusia. Namun rezeki tersebut tidak akan datang tanpa usaha dari manusia tersebut, oleh karena itu, jika seseorang ingin berkecukupan dan sejahtera, ia harus bekerja. Dalam surah AT-taubah ayat 105 dengan tegas Allah memerintahkan untuk bekerja:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ ١٠٥

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Disamping ayat diatas masih banyak ayat dan hadist yang menyuruh manusia bekerja. Bahkan menurut Alfaruqi islam adalah salah

³⁸ <http://ejournal.unisba.ac.id> > PDF pengaruh islam terhadap kinerja kerja – ejournal unisba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu agama yang tegas menyuruh manusia bekerja³⁹. Islam mendorong manusia untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya. Diharapkan setiap amal perbuatan manusia tersebut bermanfaat untuk manusia lainnya, dan dapat meningkatkan taraf hidup manusia agar sejahtera. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi setiap hajat hidup diri dan keluarga.

Tujuan bekerja dalam islam tidak hanya untuk mencari kebahagiaan di dunia saja akan tetapi untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak.

E. Konsep Operasional

Berdasarkan teori yang dijelaskan diatas maka variable penelitian yang terkandung dalam judul secara operasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

VARIABLE	INDIKATORNYA
Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengumuman kebijakan terhadap pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset 2. Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset yang mudah diakses 3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu 4. Tersedia sarana untuk usulan suara rakyat 5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik
Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan ini berkaitan dengan jumlah yang dihasilkan. 2. Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran “ tingkat kepuasan” yaitu seberapa baik penyelesaiannya.

³⁹ *ibid*

VARIABLE	INDIKATORNYA
	3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari “pengukuran kuantitatif” yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan tentang transparansi anggaran dan peningkatan kinerja aparat pemerintah desa dapat diambil kesimpulan:

1. Terkait dengan transparansi anggaran pemerintah desa Pandau Jaya kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yakni adanya pengumuman kebijakan terhadap pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset, laporan keuangan dan pengelolaan keuangan yang mudah diakses, pertanggung jawaban dari para pengurus pemerintah desa, adanya informasi ke publik sehingga prinsip-prinsip transparansi anggaran tersampaikan kepada masyarakat.
2. Bahwa kinerja aparat di desa pandau jaya mengutamakan kualitas dan kuantitas, sumber daya manusia yang kompeten, disiplin atau ketepatan waktu sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud secara maksimal, baik dan memuaskan.
3. Adapun pandangan ekonomi islam terhadap transparansi anggaran dan kinerja aparat pemerintah desa pandau jaya kecamatan siak hulu kabupaten kampar adalah sesuai dengan jiwa dan semangat ekonomi islam yang mengedepankan kejujuran, keterbukaan, bertanggung jawab dan amanah.



B. Saran

1. Para aparat di desa pandau jaya tetap mempertahankan dan menambah akses keterbukaan informasi sehingga masyarakat mengetahui segala informasi yang dibutuhkan.
2. Dalam hal kinerja, prinsip-prinsip disiplin dan sumber daya manusia yang berkualitas hendaknya diperbaharui dan ditingkatkan sehingga proses pelayanan kepada masyarakat terwujud secara optimal.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dan melengkapi khazanah literatur islamiyah dalam bidang ekonomi Islam, khususnya bidang transparansi anggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Zaky, 2002, *Ekonomi Dan Perspektif Islam*, Bandung : PT Pustaka Setia Pratama
- Al-Kaaf, Abdul Zaky. *Ekonomi Dan Perspektif Islam*. Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama Maret. 2002.
- Anggi Rahajeng, 2016, *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UGM Press
- Arifin Tahir, 2012, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: C.V Alfabeta
- Catur Sasongko, 2010, *ANGGARAN*, Jakarta: C.V Salemba Empat Press
- Chambers Robert, 2003 *Pembanguna Desa*, Jakarta : LP3ES
- Dodik Siswanto, 2004, *Prinsip-Prinsip Islam Dalam Anggaran Sektor Publik*, Jakarta: C.V Raja Grafindo
- Dwiyanto, 2006 *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Yogyakarta: C.V UGM Press
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Heriawan Bihamding, 2019, *Pengelolaan Keuangan Desa* , (Jakarta: C.V Budi Utama)
- <http://desamembangun.blogspot.co.id/2016/04/kebijakan-tentang-dana-desa-dan-ADD-tahun-2016.html>
- <http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/09/12/transparansi/>
- <http://ejournal.unisba.ac.id> > PDF pengaruh islam terhadap kinerja kerja – ejournal unisba
- <https://desa.pandaujaya.kamparkab.go.id>
- Hussein Fattah, 2017, *Kepuasan Kerja Dan Kinerja Pegawai*, Yogyakarta: Elmatara
- Lijan Poltak Sinambella, 2012, *Kinerja Pegawai : Teori Pengukuran Dan Implikasi*, Sleman: Graha Ilmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Institute of Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

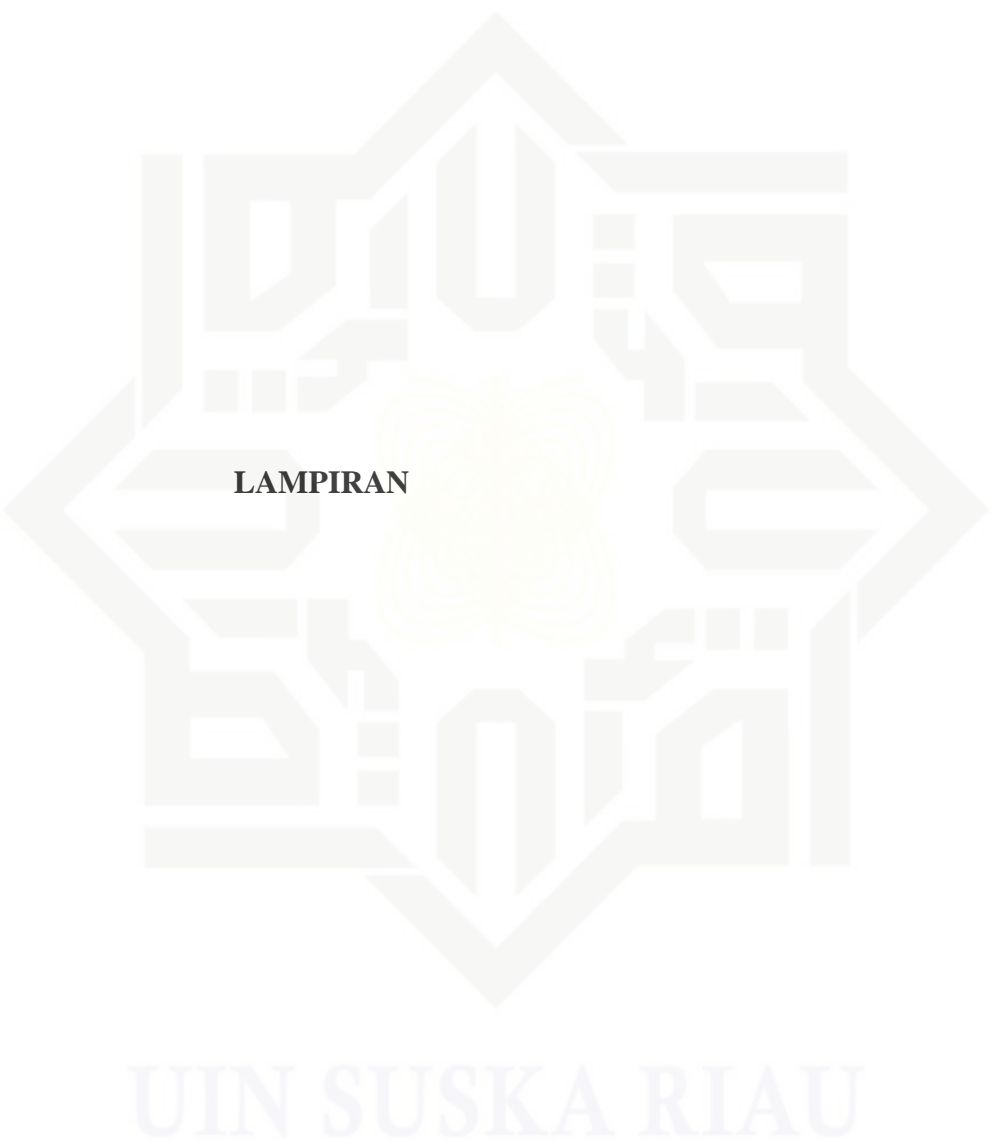
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Mardiasmo, 2004, *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET,
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET,
- Moeheriono, 2014, *Indikator Kinerja Utama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Moh. Kasiram, 2008, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: UIN-MALIKI Press
- Muhammad, 2008, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, Nurul Huda, 2010, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: KENCANA Predana Media Group.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Saparin, 1996, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Selvia Renyut, 2010, *Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kretakupa Press
- Sugiyono. 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno, A.Suhaenah. 2001, *Pembangunan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa
- Wibowo, 2016, *Manajemen Kinerja*, Jakarta: C.V Rajawali Press
- Wirawan, 2008. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KISI- KISI PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah dalam penyusunan RAPBDes, Pemerintah Desa Pandau Jaya menyampaikan pemberitahuan ke publik, siapa saja orang-orang yang berperan dalam penyusunan RAPBDes? Bagaimana bentuk pemberituannya, caranya dan kapan waktunya
2. Apakah tersedia laporan keuangan mengenai pendapatan, laporan keuangan dan aset yang bisa diakses warga?
3. Apakah desa selalu menyampaikan laporan keuangan desa tiap waktu?
4. Apakah desa menyediakan sarana untuk menerima masukan dan kritikan warga?
5. Apakah desa selalu mempublish semua pemberitahuan kepada publik setiap waktunya? Jika dipublish dimana dan kapan saja
6. Berapa lama pembuatan surat menyurat di desa bisa selesai, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk selesai
7. Berapa lama aparat desa melayani kebutuhan warga dalam sehari berapa jam?
8. Apakah kualitas pelayanan di desa telah sesuai dengan yang diharapkan?
9. Apakah pihak desa memberikan kemudahan akses kepada warga tentang penganggaran?
10. Siapa saja yang ikut berperan dalam perencanaan anggaran?
11. Bagaimana mekanisme pengaduan yang dibuat oleh desa?
12. Bagaimana kinerja pelayanan di desa?
13. Apakah pegawai selalu menyelesaikan tanggung jawabnya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Transparansi Anggaran dan Kinerja Aparat Pemerintah di Desa Pandau Jaya Perspektif Ekonomi Islam**, yang ditulis oleh :

Nama : MALIK AFIF
NIM : 11425103960
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua
Dr. H. Erman, M.Ag.

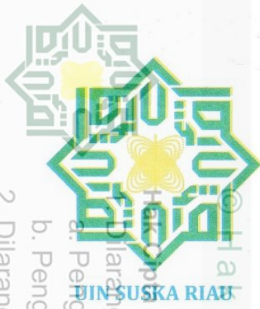
Sekretaris
Deni Rahmatillah, M.E.,Sy.

Penguji I
Afdhol Rinaldi, S.E., M.Ec

Penguji II
Jonnius, S.E.,MM

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag.
NIP : 197508012007011023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/7859/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MALIK AFIF
 N I M : 11425103960
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **24 APRIL 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

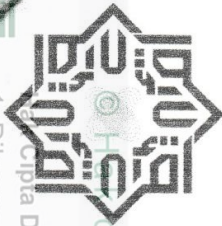
Pekanbaru, 27 September 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP.195807121986031005

Diindungi Undang-Undang.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web.http://fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Pekanbaru, 15 Oktober 2018

Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/7891/2018
 Sifat : Biasa
 Lamp. : -
 Hal : **Mohon Izin Melakukan PraRiset**

Kepada
 Yth.
 KEPALA KANTOR DESA PANDAU JAYA
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama :MALIK AFIF
 NIM :11425103960
 Semester/Tahun :IX (Sembilan)/ 2018
 Program Studi :Ekonomi Syari'ah

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Des. A. Hajar., M.Ag

19580712 198603 1005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengkomersialkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-undang
 Hak Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul : Transparansi Perencanaan Anggaran Terhadap Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu perspektif Ekonomi Islam ditulis oleh saudara :

Nama : MALIK AFIF
 NIM : 11425103960
 Program Studi : Ekonomi Islam

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 22 Maret 2019
 Narasumber : Nurnasrina, SE, M.Si

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub/Bagian Akademik

Asfendi, S.Ag, M.Si
 NIP. 19610918 198803 1 002

Pekanbaru, 02 April 2019
 Narasumber

Nurnasrina, SE, M.Si
 NIP. 19800405 200901 2 008

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengandung Undang-Undang

hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor
 Sifat
 Lamp.
 Hal

Un.04/F.I/PP.00.9/3470/2021

Pekanbaru, 16 April 2021

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MALIK AFIF
 NIM : 11425103960
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : XIV (Empat Belas)
 Lokasi : Desa pandau jaya

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Transparansi Anggaran dan Peningkatan Kinerja Aparat Desa pandau jaya.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan
 Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

1. N A M A : Malik Afif
2. NOMOR MAHASISWA : 11425103960
3. JUDUL USUL PENELITIAN : Transparansi perencanaan anggaran terhadap peningkatan kinerja aparat pemerintah desa pandau jaya
4. Hari/Tgl. Diseminarkan : Jum'at / 22 Maret 2019
5. Hasil Seminar dirumuskan adalah :
 - a. Judul : ~~Disetujui / Ditolak / Disempurnakan~~
 - b. Latar Belakang Masalah : ~~Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan~~
 - c. Permasalahan : ~~Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas~~
 - d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian : ~~Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan~~
 - e. Kerangka Teoritis (jika ada) : ~~Jelas / KurangJelas / Perlu Disempurnakan~~
 - f. Rumusan Hipotesis (jika ada) : ~~Cukup Tajam / Perlu Dipertajam~~
 - g. Metode Penelitian : ~~Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan~~
 - h. Daftar Pustaka : ~~Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti~~

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Nurnasrina, SE, M.Si

Catatan :
 Perubahan Judul dalam Seminar
 Dikonsultasikan dengan WD I

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41204
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3470/2021 Tanggal 16 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

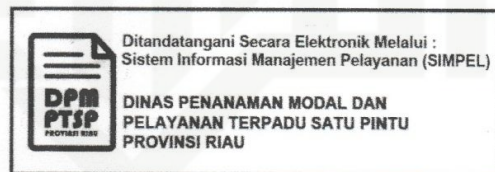
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MALIK AFIF |
| 2. NIM / KTP | : 11425103960 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TRANSPARANSI ANGGARAN DAN PENINGKATAN KINERJA APARAT PEMERINTAH DESA |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PANDAU JAYA KEC. SIAK HULU KAB. KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 Mei 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SIAK HULU
DESA PANDAU JAYA

JL. Raya Pandau Permai Desa Pandau Jaya

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/PEM/2021-81

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MALIK AFIF**
NPM/NIM : 11425103960
Jurusan/Prog.Studi : Ekonomi Islam
Tempat Penelitian : Desa Pandau Jaya
Judul Riset/Penelitian : **TRANSPARANSI ANGGARAN DAN PENINGKATAN KERJA APARAT PEMERINTAH DESA.**

Benar bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/41204 tanggal 04 Mei 2021, memberikan izin Riset / Penelitian kepada nama yang tersebut diatas untuk melaksanakan Riset/penelitian dalam rangka penyelesaian penulisan karya ilmiah di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 15 Juli 2021.

Namun diharapkan tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data ini.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

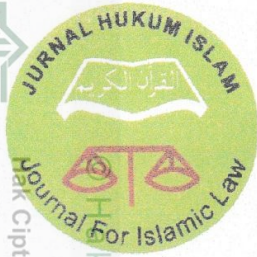
Dikeluarkan di : Pandau Jaya
Pada Tanggal : 16 Juni 2021

KEPALA DESA PANDAU JAYA
KECAMATAN SIAK HULU



FIRDAUS ROZA

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : MALIK AFIF
NIM : 11425103960
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TRANSPARANSI ANGGARAN DAN PENINGKATAN KINERJA APARAT PEMERINTAH DI DESA PANDAU JAYA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Pembimbing: Dr. H. Suhayib, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 Juli 2021
 Pimpinan Redaksi

A. P. Syahrin



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb



Penulis bernama **Malik Afif**, dilahirkan di Kota Padang, Sumatra Barat pada tanggal 7 Oktober 1996 Ayahanda Bernama Usman Sutrajaya dan Ibunda Bernama Muslinarti. Penulis anak Pertama dari 4 bersaudara. Jenjang Pendidikan dimulai dari SD NEGERI 018 KEC. BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU dari tahun 2002-2008, Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTs NEGERI BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU Dari tahun 2008-2011, dan melanjutkan pendidikan di SMA KARTIKA 1-5 PADANG Dari tahun 2011-2014, kemudian tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada Tanggal 1 Februari – 30 Maret 2017 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Pekanbaru dan Pada Tanggal 1 July – 31 Agustus 2017 Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batu Hampar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **"TRANSPARANSI ANGGARAN DAN PENINGKATAN KINERJA APARAT PEMERINTAH DI DESA PANDAU JAYA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"** di bawah Bimbingan Bapak Dr H. Suhayib M.Ag ,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.